

LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO DALAM
PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BPK



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : QANA'ATUSY SYARIFAH

NIM : 126231087

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO DALAM
PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BPK



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : QANA'ATUSY SYARIFAH
NIM : 126231087

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO DALAM
PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BPK**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Qana'atusy Svarifah

126231087

Disetujui Oleh:

Pembimbing

F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA.

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO DALAM
PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) BPK**

Qana'atusy Syarifah

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia

Email: qanaatusy.126231087@stu.untar.ac.id

Abstrak: TLRHP BPK wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki persentase penyelesaian TLRHP terendah di Provinsi Gorontalo namun pada tahun 2023 mendapatkan progres penyelesaian TLRHP tertinggi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian TLRHP oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan upaya percepatan penyelesaian TLRHP. Selain upaya dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi upaya percepatan penyelesaian TLRHP yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan mengambil data primer yang dihimpun dari wawancara terhadap responden dari pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sedangkan data sekunder berasal dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) dan Laporan Pemantauan TLRHP Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya percepatan penyelesaian TLRHP BPK dilakukan oleh kedua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya (1) Meningkatkan komitmen penyelesaian TLRHP melalui Inspektorat Daerah; (2) Melakukan pemetaan atas rekomendasi BPK (3) Mengoptimalkan MP-TGR. Adapun upaya dukungan dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam mendukung percepatan penyelesaian TLRHP adalah sebagai berikut (1) Mengoptimalkan SIPTL; (2) Membuka jalur konsultasi dan diskusi percepatan TLRHP; (3) Inventarisasi TLRHP; (4) Berkoordinasi dengan Inspektorat; (5) TLRHP sebagai indikator penilaian kinerja satker; (6) Pemberian apresiasi; dan (7) Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi lain di wilayah Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci : tindak lanjut, upaya percepatan, kendala, rekomendasi, TLRHP

Abstract:

The implementation of the BPK Follow-Up Audit Report (TLRHP) is mandatory for Regional Governments to address the recommendations provided in the BPK Audit Results Report. The Government of North Gorontalo Regency had the lowest percentage of TLRHP completion in Gorontalo Province; however, in 2023, it achieved the highest progress in TLRHP completion within the province. This study aims to examine the challenges and issues faced by the North Gorontalo Regency Government in resolving the TLRHP, as well as the efforts to accelerate its completion. In addition to the efforts of the North Gorontalo Regency Government, the research seeks to identify the measures taken by the BPK Representative Office in Gorontalo Province to expedite TLRHP completion. The research utilized primary data collected through interviews with respondents from the North Gorontalo Regency Inspectorate and the BPK Representative Office in Gorontalo Province, while secondary data was derived from the Regional Audit Summary (IHPD) and the TLRHP Monitoring Report for North Gorontalo Regency. The findings reveal that efforts to accelerate TLRHP completion were carried out by both the North Gorontalo Regency Government and the BPK Representative Office in Gorontalo Province. Efforts by the North Gorontalo Regency Government include: (1) Enhancing commitment to TLRHP resolution through the Regional Inspectorate, (2) Mapping BPK recommendations, and (3) Optimizing the MP-TGR mechanism. Meanwhile, the support initiatives from the BPK Representative Office in Gorontalo Province include (1) Optimizing the SIPTL, (2) Establishing consultation and discussion channels for TLRHP acceleration, (3) Conducting TLRHP inventory, (4) Coordinating with the Inspectorate, (5) Utilizing TLRHP as a performance evaluation indicator for work units, (6) Providing recognition and appreciation, and (7) Coordinating with law enforcement agencies (APH) and other relevant institutions in Gorontalo Province.

Keywords: *follow-up, acceleration efforts, challenges, recommendations, TLRHP*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis menerima banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga tercinta atas dukungan moral dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini;
2. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, Ketua Program Studi PPA FEB Universitas Tarumanagara, atas arahnya selama proses studi;
3. F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA., sebagai Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan masukan berharga untuk penyelesaian tugas akhir ini;
4. Seluruh dosen, staf, dan karyawan PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama masa perkuliahan dan berbagi ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis; dan
5. Teman-teman dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat hingga tugas akhir ini terselesaikan.

Penulis juga berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan, yang mungkin terjadi selama proses penyusunan tugas akhir ini, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 2024

Qana'atusy Syarifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Pembahasan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	5
B. Pemeriksaan Keuangan Negara	6
C. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	7
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
A. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kendala BPK pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	13
B. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.....	15
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	19
D. Upaya dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam membantu percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK.....	21
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	25
A. Simpulan	25
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo.....	1
Tabel 2	Persentase Penyelesaian TLRHP.....	14
Tabel 3	Jumlah Temuan Pemeriksaan, Rekomendasi dan Status Penyelesaian TLRHP per Tahun pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara periode Semester I 2024	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Validasi Penyelesaian TLRHP	14
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, setiap tahun melaksanakan audit terhadap laporan keuangan, kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil dari audit tersebut disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. LHP ini berisi informasi temuan pemeriksaan, kondisi, sebab, akibat, simpulan serta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang dibuat oleh pemeriksa BPK berdasar pada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam LHP. Rekomendasi menghilangkan sebab dari sebuah temuan pemeriksaan sehingga memperbaiki sebuah system dan alur yang ada. Rekomendasi BPK ini wajib ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Rekomendasi ini wajib ditindaklanjuti dan disampaikan kepada BPK dengan batas waktu 60 hari sejak LHP diterima oleh Pemerintah.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memantau tindak lanjut BPK secara berkala pada tiap semester dan menerbitkan laporan pemantauannya. Pemantauan dilaksanakan melalui sebuah sistem yaitu Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 1 Persentase Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo

No	Pemerintah Daerah	Penyelesaian TLRHP				
		2020	2021	2022	2023	2024 semester I
1	Provinsi Gorontalo	71,75%	70,44%	64,93%	73,30%	69,64%
2	Kota Gorontalo	74,91%	72,93%	68,80%	80,75%	76,71%
3	Kabupaten Gorontalo	71,21%	74,11%	68,70%	81,06%	72,07%
4	Kabupaten Bone Bolango	75,83%	77,98%	70,64%	78,59%	75,64%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	53,96%	55,30%	51,36%	69,57%	69,69%
6	Kabupaten Boalemo	73,88%	79,34%	73,29%	79,20%	74,27%
7	Kabupaten Pohuwato	87,62%	85,22%	80,29%	86,61%	79,26%

Pada tabel diatas Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki persentase penyelesaian TLRHP paling rendah di antara Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo dari tahun 2020. Namun, pada awal tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan penghargaan dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai peringkat pertama atas progres tertinggi atas penyelesaian TLRHP BPK dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK terletak pada perannya sebagai instrumen perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Apabila rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti, hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang lebih besar, serta merusak reputasi pemerintah daerah di mata publik.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, penelitian dengan judul **“Analisis Upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK”** diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian TLRHP, mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian TLRHP oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan upaya percepatan penyelesaian TLRHP baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara maupun BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelesaian TLRHP BPK?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam \ penyelesaian TLRHP BPK?
3. Apakah terdapat upaya dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam mendorong percepatan penyelesaian TLRHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam kegiatan penyelesaian TLRHP BPK;
2. Menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam \ penyelesaian TLRHP BPK; dan
3. Mengidentifikasi Upaya dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam mendorong percepatan penyelesaian TLRHP.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bagian pembelajaran dalam bidang *Auditing*, Keuangan Negara dan Akuntansi serta dapat digunakan sebagai acuan/referensi untuk mengembangkan penelitian pada topik yang sama untuk kedepannya.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan penyelesaian TLRHP BPK bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, guna mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun oleh penulis ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah yang ingin diangkat, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh dari penelitian sebelumnya dan literatur berupa buku maupun peraturan perundang-undangan. Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian, data yang digunakan dan jangka waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Penulis melakukan pembahasan atas hasil yang diperoleh kemudian untuk dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan \ penulis sebagai rekomendasi perbaikan atau langkah lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiya Imtina Putri, M. S. 2021. Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 6, No. 1.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. *Warta Pemeriksa Edisi 9, Vol IV. September 2021*. https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-9-vol-iv-september-2021_warta_pemeriksa_september_2021_1632960739.pdf
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020*.
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2022. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021*.
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2023. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022*.
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2024. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024*.
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. 2024. *Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023*.
- COSO.1992. *Internal Control Integrated Framework*
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Murwanto & Ramadhan. 2009. *Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar Bagi Pembangunan)*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta
- Rahmi Fauzia, P. S. 2023. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Kabupaten Pasaman*: *Jurnal Mirai Management*.
- Rahmi Ramadhan Pongoliu, D. S. 2017. *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* Vol 8, No. 1.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Sisilia Amelia Essing, D. P. 2017. *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol 8, No. 1.
- Sugih Sutrisno Putra, M. F. 2021. *Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat: Pro Bank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*